



APARTEMEN WAJIB SEDIAKAN 20 PERSEN UNTUK MBR

Butuh Kearifan Kawal Perda Rumah Susun

YOGYA (KR) - Kendati di Kota Yogya sudah ada Perda 2/2016 tentang Rumah Susun (Rusun), namun realisasinya masih sulit diterapkan. Dibutuhkan kearifan bagi seluruh pemangku kepentingan agar Perda Rusun dapat dijalankan guna memenuhi kebutuhan hunian.

"Perda itu sebenarnya sudah menjawab kebutuhan masyarakat atas hunian. Baik masyarakat menengah ke atas maupun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tinggal bagaimana semua pemangku memiliki kearifan dalam menyikapinya," urai Ketua Real Estate Indonesia (REI) DIY, Nur Andi Wijayanto, Selasa (9/5).

Terkait kebutuhan hunian, Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogya sudah melakukan pemetaan bekerja sama dengan UGM pada 2015 silam. Proyeksi kebutuhan hunian mencapai 101.526 unit, sedangkan

yang sudah terbangun mencapai 92.965 unit. Masih ada kekurangan 8.561 unit rumah.

Jika dibandingkan dengan ketersediaan lahan, maka konsep rumah tapak sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan dan harganya semakin tidak terjangkau kalangan MBR. Sehingga hunian vertikal berupa rusun umum maupun rusun komersil atau apartemen digadang-gadang menjadi solusi.

"Solusi atas harga lahan yang kian tak terbeli, sudah diatur dalam Perda 2/2016. Terutama kewajiban pengembang apartemen untuk menyediakan 20 lahannya bagi MBR

liki hunian layak di Kota Yogya karena harga terus merangkak," jelasnya.

Sementara, Direktur PT Abyudaya Tata Anugerah Mandiri, Taufik, selaku pengembang dari Apartemen Puri Notoprojo menegaskan pembangunan rumah susun komersilnya tetap mempertahankan regulasi yang ada. Termasuk kewajiban untuk menyediakan 20 persen dari total kamar untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Tak hanya membangun hunian bagi MBR, pihaknya memastikan telah menyiapkan skema pelibatan warga sekitar. Salah satunya mengajukan data warga yang memiliki usaha atau akan membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan penghuni apartemen. "Mulai jasa laundry sampai catering, kami akan berusaha untuk melibatkan warga sekitar," jelas

lasnya.

Mengenai kekhawatiran warga sekitar soal air tanah, Taufik menjelaskan, sesuai dengan regulasi, sumber air untuk penghuni apartemen wajib menggunakan air dalam dan PDAM. Bahkan pihaknya juga membangun sumur resapan guna mempertahankan kualitas air permukaan. Pihaknya menyangkan aksi penolakan yang terjadi di lokasi lahan miliknya yang dituduhkan sudah melakukan kegiatan konstruksi.

Faktanya kondisi saat ini di lahan tersebut baru dilakukan aktivitas pembangunan pagar keliling dan pembenahan saluran gorong-gorong untuk penataan lebih baik.

"Kami selaku pengembang sangat memahami dan menghormati proses perizinan yang masih berjalan," tandasnya. (Dhi)-m

Tinggal menunggu kesiapan Pemkot saja," imbuh Andi.

Mantan Ketua Raperda Rusun, Suwanto, mendesak Pemkot agar sosialisasi Perda 2/2016 digencarkan. Hal ini supaya tidak terjadi multitafsir di kalangan warga sekitar pembangunan rusun, serta iklim investasi bisa semakin kondusif. "Perda ini hadir guna menjawab ketidakmampuan memi-

Instansi	Sifat	Tindak Lanjut
----------	-------	---------------



KR-Ardhi Wahdan

Lokasi yang sedianya hendak dibangun Apartemen Puri Notoprojo.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005